

ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAH KAMPUNG SEKBAN DISTRIK PARIWARI KABUPATEN FAKFAK

Oleh

Muzdalifa Nasarun, Ridha, Samsuri³

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asy-Syafi'iyah Fakfak

³Samsuri.plh@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the main tasks and functions (TUPOKSI) of the Sekban Village Government. This study is based on the phenomenon in the field which shows that there are still several obstacles in the implementation of the main tasks and functions of the Sekban Village Government. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Informants in this study were the village head, village officials, and the Village Supervisory Agency (BAPERKAM). The results of the study indicate that the implementation of the main tasks and functions of the Sekban Village Government has been quite optimal. This is caused by several factors, including: (1) increased understanding of the main tasks and functions of the Sekban Village Government, (2) increased human resource competency, (3) increased community participation. Based on the results of the study, it is recommended that the Sekban Village Government continue to strive to improve coordination between officials, increase access to information, and strengthen supervision of the implementation of the main tasks and functions in Sekban Village, Pariwari District, Fakfak Regency.

Keywords: *Village Government, Implementation, tasks and functions.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Pemerintah Kampung Sekban. Penelitian ini didasarkan pada fenomena di lapangan yang menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kampung Sekban. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala Kampung, perangkat Kampung, dan Badan Pengawasan Kampung (BAPERKAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kampung Sekban sudah cukup optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) peningkatan pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kampung Sekban, (2) peningkatan kompetensi sumber daya manusia, (3) peningkatan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar Pemerintah Kampung Sekban terus berupaya meningkatkan koordinasi antar perangkat, meningkatkan akses informasi, dan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kampung Sekban Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak.

Kata Kunci: *Pemerintah Kampung, Pelaksanaan, Tugas dan Fungsi.*

Latar Belakang

Desa atau yang selanjutnya disebut Kampung menjadi ujung tombak pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang berada di kampung guna terwujudnya pembangunan disegala bidang. Penyelenggaraan pemerintahan kampung merupakan

subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada Pasal 2 menyatakan bahwa Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan nama Desa menjadi Kampung tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, bahwa pada pasal 1 ayat 14 menyebutkan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan seseorang anggota organisasi dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang dibuat berdasarkan tujuan, visi, dan misi suatu organisasi Janice (2014). Berkaitan dengan ketentuan tersebut, ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga kampung, pemerintah Kampung dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintahan.

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah kampung diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang desa dan Peraturan Bupati Fakfak nomor 15 tahun 2019. Pemerintah Kampung menurut Peraturan Bupati Fakfak Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kampung, adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung (bpk.go.id). Kepala Kampung bertugas menyelenggarakan 1) pemerintahan kampung; 2) melaksanakan pembangunan kampung; 3) pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung; 4) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Fakfak Nomor 15 Tahun 2019 pasal 8 ayat 1,.

Tugas yang pertama yaitu Pemerintahan kampung meliputi tata praja pemerintahan, penetapan peraturan kampung, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan masalah ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah. Tugas kedua yaitu melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana prasarana perkampungan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Tugas ketiga yaitu pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan. Tugas ke empat yaitu pemberdayaan masyarakat, meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna; dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Kepala Kampung bekerja dibantu oleh Perangkat Kampung. Pada ayat 9 dari pasal 2 peraturan bupati Fakfak no 15 tahun 2019 lebih lanjut menjelaskan bahwa perangkat kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala

Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Pemerintah kampung beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya.

Pada pasal 3 peraturan Bupati Fakfak no 15 tahun 2019, Perangkat Kampung terdiri dari Sekretaris Kampung dan Pelaksana Teknis. Sekretaris kampung berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Kampung. Tugas sekretaris kampung sebagaimana di maksud pada pasal 14 dalam Peraturan Bupati Fakfak no 15 tahun 2019 adalah membantu Kepala Kampung dalam bidang administrasi pemerintahan. Pelaksana Teknis terdiri dari Seksi pemerintahan dan Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

Kepala Seksi Pemerintahan menurut Peraturan Bupati Fakfak No 15 tahun 2019 yang bertugas memimpin, merencanakan, mengkoordinir serta mengawasi jalannya kegiatan Pemerintahan Kampung, administrasi kependudukan, pertanahan serta ketentraman dan ketertiban; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kampung baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas teknis pemerintahan kampung.

Menurut Peraturan Bupati Fakfak No 15 tahun 2019, Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan bertugas 1) memimpin, merencanakan, mengkoordinir serta mengawasi jalannya pendataan keluarga miskin serta pembinaan Kesejahteraan Sosial (PMKS), keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan; 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kampung baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas teknis pemerintahan kampung.

Pada pasal 3 peraturan Bupati Fakfak no 15 tahun 2019, perangkat kampung selain Sekretaris Kampung terdapat Pelaksana Teknis, yaitu Kepala Urusan Umum dan Perencanaan serta Kepala Urusan Keuangan. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Kampung dalam urusan pelayanan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan kampung, mempersiapkan bahan rapat dan laporan serta pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan lainnya. Dan. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kampung baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Kampung.

Kepala Urusan Keuangan sebagaimana di maksud pada peraturan Bupati Fakfak no 15 tahun 2019 bertugas membantu Sekretaris Kampung dalam urusan pengelolaan keuangan kampung, menyiapkan data guna penyusunan rancangan maupun perubahan APB-Kam, mengelola dan membina administrasi keuangan kampung, menggali sumber pendapatan kampung, membantu kelancaran dalam pemasukan pendapatan daerah dan pendapatan kampung, menginventarisir kekayaan kampung serta pendukung pelaksanaan tugas-tugas administrasi keuangan kampung lainnya. tugas berikutnya adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kampung maupun Sekretaris Kampung baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat kampung. Kepala Urusan Keuangan bertugas menyusun RAK Kampung; dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan kampung dan pengeluaran kampung dalam rangka Pelaksanaan APB-Kampung.

Kabupaten Fakfak memiliki 142 kampung salah satunya adalah Kampung Sekban. Saat ini Kampung Sekban dipimpin oleh kepala kampung yang bernama Raida Rahma Tanggahma. Salah satu contoh tugas yang sudah dijalankan oleh Kepala Kampung Sekban adalah menyarankan warga bersihkan lingkungan sebagaimana yang diwartakan di Radio Republik

Indonesia oleh Mohan (2024).

Berdasarkan hasil wawancara awal di Kampung Sekban Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, diperoleh gambaran bahwa pelayanan pemerintah kampung kepada masyarakat telah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat kendala-kendala dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah kampung. Kendala yang terjadi berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga, antara lain tentang sosialisasi tugas dan fungsi pemerintah kampung. Selain itu, perlunya bimbingan teknis (BIMTEK) bagi perangkat kampung yang masih baru dalam dunia pemerintahan. Hasil wawancara awal juga diperoleh gambaran bahwa warga jarang melakukan pengurusan di desa terkadang karena dari pemerintah atau aparat kampung sendiri yang datang ke rumah-rumah warga untuk menanyakan apa yang dibutuhkan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pemerintahan kampung berdasarkan Peraturan Bupati No 15 tahun 2019 dan beberapa temuan awal maka penulis tertarik untuk melakukan Analisis pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintah Kampung Sekban Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kampung Sekban terkait ketersediaan dan aksesibilitas layanan publik. Harapan dari Penelitian ini adalah dapat memberikan rekomendasi solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan Kampung Sekban.

Hasil penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis dalam melakukan langkah-langkah penelitian adalah pertama, penelitian Pubra, (2015) yang berjudul tugas dan fungsi kepala desa beserta perangkat desa dalam meningkatkan kinerja pada kantor desa Namo bintang kecamatan pancur batu kabupaten Deli Serdang. Penelitian terdahulu berikutnya adalah Irawan (2018) yang berjudul pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian terdahulu lainnya adalah Yolanda (2019) yang berjudul Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif dengan tujuan untuk memberikan deskripsi secara detail dan analisa mengenai kualitas atau isi dari suatu pengalaman manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Moleong (2019:6). Adapun yang menjadi tujuan peneliti dalam penelitian ini untuk menggambarkan objek tentang peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi aparat kampung sekban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghimpun data dan mendapatkan informasi dengan menggunakan wawancara mendalam dalam observasi yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

Subjek penelitian menurut Moleong (2010:132) adalah subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, sejalan dengan definisi tersebut. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Kampung sejumlah 10 orang yaitu satu Kepala Kampung, dua orang kepala urusan (KAUR) dan 2 orang badan pengawasan kampung (BAPERKAM). Objek penelitian menurut Moleong (2020:132) adalah hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Maka objek dalam penelitian ini adalah tugas dan fungsi pemerintah Kampung Sekban Distrik Pariwari yaitu Kepala Kampung beserta Perangkat Kampung Sekban.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian kualitatif menurut Sarwono (2006:209) adalah teks hasil wawancara dengan

informan yang dijadikan sampel penelitian. Data primer yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teks hasil wawancara tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kampung Sekban.

Data sekunder dalam penelitian kualitatif menurut Sarwono (2006:209) adalah data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh dengan membaca, melihat, atau mendengarkan. Data sekunder yang di pakai dalam penelitian ini adalah seperti buku majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kampung Sekban.

Instrument penelitian dalam penelitian ini digunakan sebagai alat bantu yang digunakan untuk menggali data dalam penelitian, sehingga kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana yang dikatakan oleh Moleong (2005:4) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, manusia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya. Dalam kegiatan penelitian ini instrument penelitian yang digunakan adalah pertama penelitian sendiri, kedua adalah pedoman wawancara, ketiga adalah alat-alat tulis dan catatan lapangan, dan keempat adalah alat rekaman. Sarwono (2006:209) mengatakan bahwa data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti, maka dalam penelitian ini digunakan alat bantu rekam.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa metode yakni pertama adalah observasi. Metode observasi ini biasa digunakan dalam penelitian sosial (Denzin dan Lincoln: 2009). Metode pengumpulan data kedua adalah wawancara. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, data dokumen dapat berupa gambar, tulisan atau karya monumental dari seseorang atau organisasi. Hasil pengumpulan data melalui wawancara dan observasi akan lebih kredibel jika dukung oleh dokumen-dokumen, data atau pun foto yang ada (Sugiyono, 2020:231).

Analisis data dalam penelitian ini merunut pada pendapat Miles dan Huberman dalam Emzir (2010:129), bahwa analisis dalam penelitian kualitatif menggunakan model interaktif data, dengan tahapan yang pertama adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode aspek tertentu. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Setelah data direduksi selanjutnya menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Tahapan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kampung Sekban adalah salah satu kampung di wilayah kabupaten Fakfak dengan batas- batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Dulanpokpok, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Dulanpokpok, sebelah selatan berbatasan dengan laut Seram, dan sebelah barat berbatasan dengan Kampung Torea. Kampung Sekban adalah wilayah adat keluarga besar Rengen yang di berikan kepada besar Tanggahma perwakilan keluarga Bapak Komadimadi Tanggahma , lalu secara turun temurun dilanjutkan Bapak Adikabuk Tanggahma - Bapak Moksen Tanggahma – Bapak Djen Tanggahma – Bapak Hasan Tanggahma sampai generasi sekarang. Dari kesepakatan adat ini maka dilakukan pengukuhan kepala dusun dan Kapitan Tanjung Bambu oleh Raja, yang mana Kapitan Tanjung Bambu pertama yaitu Bapak Landia selanjutnya kepada Lajamiu dan kemudian kepada Bapak Nyong Utang sampai sekarang.

Kampung Sekban mula-mula disebut Sekru lalu disebut sebagai Tanjung Bambu karena wilayah daratan dipenuhi rimbun pepohonan bambu. Secara pemerintahan kampung ini merupakan bagian dari Kampung Dulanpokpok (sekarang Kelurahan Dulanpokpok) RT 03. Kampung Sekban disebut juga dengan nama lain yakni sekru atau sekru buton atau sekru banda. Sekru Buton ini pada waktu itu tang berdomisili di Tajung Bambu terdiri dari 8 (delapan) Kepala Keluarga yakni 2 (dua) kepala keluarga dari keluarga asli Fakfak dan 6 (enam) Kepala Keluarga suku Buton dimana terjadi perkawinan silang atau campuran dari keluarga Fakfak dengan keluarga Buton yang telah berdomisili di wilayah Tanjung Bambu sedangkan istilah Sekru Banda adalah perpindahan penduduk secara besar- besaran dari banda ke sekban akibat terjadi gempa bumi (letusan gunung berapi) pada tahun 1988 yang kemudian berdomisili tetap di Kampung Sekban. Setelah terjadi pemekaran Kampung dari Kampung Dulanpokpok pada tahun 1990 maka Kampung Sekban melakukan pemilihan pertama Kepala Kampung dengan calon pada waktu itu terdiri dari tiga orang yaitu: Bapak Karel Ubra, Bapak La Jamiu dan Bapak Kamalun Huda yang mana terpilih selaku kepala kampung yaitu Bapak Karel Ubra disini secara pemerintahan Kampung Sekban kenal dengan sebutan yakni Sekarang Membangun.

Data dari hasil penelitian ini di dapatkan melalui observasi dan wawancara mendalam. Informan yang melakukan wawancara mendalam adalah kepala kampung, sekertaris kampung, kepala urusan (KAUR) umum, kepala urusan (KAUR) keuangan, kepala seksi (KASI) pemerintahan, kepala seksi (kasi) kesejahteraan masyarakat, badan pengawas kampung (BAPERKAM), dan ketua RT. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan-informan. Hasil wawancara selanjutnya di reduksi untuk memilih informasi-informasi yang penting.

Pemahaman Pemerintah Kampung Tentang Keberhasilan Dalam Menjalankan Tugas Sesuai Dengan Bidang Tugasnya

Hasil wawancara yang pertama adalah dengan Kepala Kampung yaitu Ibu Rahma Tanggama mengatakan bahwa:

“Sesuai dengan tugas dan fungsi saya sebagai kepala kampung, saya selalu mengayomi warga untuk bermasyarakat dan memberikan apa yang menjadi hak-hak dari masyarakat, sesuai dengan program. Selaku pemerintahan kampung, saya melihat kebutuhan warga, saya juga melihat kebutuhan prioritas warga. Kendala itu banyak, misalnya warga itu kadang punya pemikiran tidak sama dengan pemerintah, misalnya mereka tidak berpikir bahwa bantuan dari manapun itu ada prosedurnya, ada punya aturan sendiri. Walaupun tidak sepenuhnya mungkin terselesaikan, tapi apabila masyarakat itu sudah menikmati, kami puas. Seperti bantuan nelayan, mereka membutuhkan jembatan, kami sebagai Pemerintah Kampung berusaha untuk

memberikan jembatan. Mereka punya perahu bisa parkir di situ atau mereka punya kebetulan untuk melaut, bisa semua lewat situ. Apabila mama-mama yang UKM punya kebutuhan, mungkin mereka minta payung untuk menjual, kami mengadakan untuk mereka. Begitu pun juga petani punya kebutuhan bibit atau pupuk, kami Pemerintah Kampung memberikan bantuan kepada mereka.”

Informan berikutnya yaitu Sekretaris Kampung Bapak La Ayudin La Adi mengatakan:

“Saya selaku Sekretaris Kampung, artinya tugas saya adalah membangun komunikasi baik dengan kepala kampung, kemudian mendengarkan arah kepala kampung, kemudian mempersiapkan administrasi kampung, dan kemudian kewajiban saya itu adalah selalu memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat, mengkoordinir teman-teman aparat kampung. Kalau menilai keberhasilan memang bukan kita yang berkuasa, tapi menurut pengamatan saya ada keberhasilan. Memang juga ada kendala-kendala dari sisi administrasi. Kegiatan di lapangan dengan masyarakat dapat teratasi dengan baik. Kendala yang dihadapi itu mungkin diskomunikasi. Kita sebagai para desa, kita semangat bekerja, bertanggung jawab terhadap tugas yang kami pegang.”

Informasi lain disampaikan oleh bapak Fredy J. O. Masnifit selaku Kaur Pemerintahan.

“Yang sudah dilakukan yaitu yang pertama pendataan profil kampung secara menyeluruh. Profil kampung yang mulai tertata dengan baik, mengkualifikasi data terkait dengan jumlah kependudukan, pekerjaan dan segala macam akhirnya. Tahun 2023 Pemerintah Kampung Seksi Pemerintahan mendapatkan kepercayaan dari Pemerintahan Kabupaten dan BPS sebagai pusat data statistik terbaik di kampung. Kerja sama dengan pihak lain yaitu dari Agraria berupa pengkajian-pengkajian ekonomi pertanian, perikanan. Profil kampung mulai dari 2023 sampai 2025 berdasarkan peta kampung yang akurat. Data profil kampung mulai dari omset, data kampung, kekayaan kampung, peluang dari kesempatan yang ada agar kampung itu mulai tertata sehingga diarahkan menjadi kampung digital. Target pembangunan nantinya semua berdasarkan digital seperti surat menyurat dan data, supaya setiap orang mampu melihat perkembangan dan sumber daya pemerintahan kampung. Untuk itu sementara ini kami masih menyiapkan instrument pendukung mulai dari profil kampung, kelembagaan kampung. Ada beberapa kekurangan dan hal yang harus di perbaiki oleh pimpinan kampung, karena kampung tidak hanya membutuhkan aparat yang hebat tapi di butuhkan kerja sama yang baik mulai tingkat RT, masyarakat, dusun, pemerintahan distrik, pemerintahan kabupaten dan pemerintahan lainnya dalam hal ini tetangga kampung seperti kampung sebelah atau kelurahan. Misalnya kerja sama dengan distrik, kerja sama dengan kampung Torea, Dulan Pokpok, Kampung Tanama, Sekru, Sekru Tuare. Target kerjasama yang sudah dilakukan pertama adalah pelatihan Aparatur Kampung terkait dengan mekanisme Tupoksi Pemerintahan Kampung. Pelatihan dilaksanakan dengan mengundang perwakilan dari inspektorat, tata pemerintah sekda, BMPK. Setelah pelatihan semua kaur berjalan sesuai dengan porsi dan seluruh laporan pertanggung jawaban di sampaikan melalui Kaur dan dipertanggungjawabkan pada Kepala Kampung. Evaluasi dilakukan di tingkat Sekertaris, setelah itu baru Kepala Kampung mengambil keputusan terkait dengan mekanisme penguat sistem kinerja pemerintahan. Jadi tidak lagi Kepala Kampung mengambil alih seluruh pekerjaan, mengambil alih seluruh pembelanjaan atau melakukan seluruh program pembangunan.”

Pendapat lain dari Ibu Ratna mengatakan bahwa:

“Dalam pembagian BLT kadang diperuntukan untuk anak yatim, contohnya ada

pembiayaan biaya sekolah kampung mengambil kebijakan membayar pake uang BLTnya. Untuk melunasi biaya di sekolah maka pemerintah kampung sendiri supaya dia tidak menjadi beban, karena dia anak yatim piatu.”

Pernyataan Di perjelas oleh ketua badan pengawasan kampung sekban (BAPERKAM), Bapak Nyong Utang mengatakan bahwa:

“Kalau bicara tentang aturan pemerintah kampung kalau dari aparat kampung itu memang mereka punya tanggung jawab fungsi masing-masing kalau mereka jalankan sesuai dengan harapan. Yang penting itu realisasi atau laporan RPP kampung dan sampai di kabupaten tidak ada hal yang tidak wajar. Sampai sejauh ini semua masih terkendali, terkait tugas pokok dan fungsi di masing-masing bidang. Bisa dikatakan cukup baik dari yang sebelumnya tidak ada tumpah tindih pekerjaan semua bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing.”

Hasil wawancara dengan Pemerintah Kampung menunjukkan bahwa Pemerintah Kampung Sekban sudah menjalankan tugasnya antara lain pembangunan jembatan untuk mempermudah akses nelayan dalam aktivitas sehari-hari. Bentuk keberhasilan lain seperti Peningkatan Kesejahteraan melalui pemberian bantuan seperti bibit, pupuk bagi petani, dan payung untuk pedagang kecil. Berkurangnya konflik atau kesalahpahaman melalui pendekatan musyawarah juga merupakan bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas. Keberhasilan lain adalah menyusun profil kampung yang nantinya akan menuju kampung digital. Kampung digital ini akan memberikan manfaat besar, karena dapat dilihat dan diakses siapapun yang ingin mengetahui tentang kampung sekban dan selain itu dapat juga mempermudah urusan administrasi kampung. Penyusunan profil kampung ini berdasarkan kerjasama dengan pemerintah kabupaten. Kerjasama ini antara lain berupa pelatihan penyusunan profil kampung. Setelah menerima pelatihan, membuat terjadinya pembagian kerja yang baik sehingga tidak lagi semua pekerjaan diambil alih oleh Kepala Kampung.

Keberhasilan dalam Bidang Sosial Tugas dan Fungsi. Mengelola bantuan langsung tunai (BLT) secara tepat sasaran dan memberikan solusi untuk masyarakat yang kurang mampu. Keberhasilan Utama Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kebijakan pemerintah kampung membantu anak yatim membayar biaya pendidikan menggunakan dana BLT, Adanya tindakan solutif untuk membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan, seperti biaya pendidikan anak yatim.

Pemahaman Pemerintah Kampung Tentang Ketepatan Dalam Melaksanakan Tugas Sesuai Dengan Prosedur

Hasil wawancara pertama sesuai dengan yang di sampaikan Ibu Rahma Tanggama selaku Kepala Kampung sebagai berikut:

“Menurut saya, Pemerintah Kampung sudah bekerja dengan tupoksi masing-masing, Kalau memang itu pun ada kendala, kami bicarakan bersama. Kalau untuk fungsi kontrol, ada Sekretaris dan kami tetap mengontrol itu, terutama dalam mensosialisasikan prosedur dan peraturan yang berlaku kepada aparat kampung dan masyarakat. Kami punya RT untuk menyampaikan segala sesuatu itu dan selanjutnya nanti kita berembuk untuk aparat di Balai Kampung. Biar musyawarah bersama menjadi keputusan bersama. Pada akhir tahun selalu meleporkan LPJ kami. Di situ kami selalu meleporkan LPJ kami, terus kami di kampung juga ada papan informasi. Ada baleho yang kami tampilkan, itu LPJ kami.”

Kemudian informasi lainya di sampaikan oleh Bapak La Ayudin La Adi yang mengatakan:

“Terkait dengan ketepatan waktu ataupun tugas yang kita tentuka, ada jadwal kegiatan. Intinya perintah dari pimpinan Kepala Kampung itu kami patuhi demi kemajuan kampung, dan sudah sesuai dengan prosedur tidak ada yang kena-kena hukum, masalah tidak ada.”

Pendapat lain juga datang dari Ibu Megawatai yang mengatakan:

“Hal-hal atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kampung contohnya Kaur Keuangan yang mendapat informasi bahwa ada tahapan tahapan dan ABPD/ABPN yang suda turun ke kampung tidak pernah menunda jadi jadi sudah langsung pergi ke DPMK, BANK, dan Distrik untuk langsung di tanyakan tidak pernah menunda jadi selalu sesuai dengan prosedur.”

Hal senada juga di sampaikan oleh Ibu Ratna mengatakan:

“Kepala Kampung kalau seandainya tentang kerja tidak sesuai prosedur beliau langsung tegur, begitupun dengan pak Sekretaris beliau selalu awasi katong punya pekerjaan jadi tidak pernah melanggar aturan yang suda di tentukan.”

Begitupun yang disampaikan oleh salah seorang kepala RT sebagai berikut:

“kalau yang saya lihat pemerintah kampung sendiri sudah menjalankan prosedur mereka masing-masing dengan baik, di mana melayani masyarakat dengan jemput bola. Mereka selalu menayakan kepada masyarakat apa yang di butuhkan. Kalau berkaitan dengan pengurusan surat menyurat mereka selalu menerima dua puluh empat jam, untuk melayani masyarakat.”

Pendapat lain datang dari sekretaris badan pengawasan kampung (BAPERKAM) sebagai berikut :

“kalau menurut saya pemerintah kampung itu sudah bagus ya, Apa yang dibutuhkan masyarakat mereka bisa memeberikan walaupun tidak secara lagsung semua dapat tapi secara bertahap- tahap, intinya kalau dari pemerintahan yang ini lebih baik dari pemerintahan sebelumnya mulai memperhatikan masyarakat tugas pokok dan fungsi mereka juga dilaksanakan sesuai bidang maing-masing.”

Dan di perjelas oleh ketua badan pengawasan kampung sekban (BAPERKAM) bapak nyong utang yang mengatakan bahwa:

“itu memang aturannya sudah berdasarkan peraturan daerah yaitu peraturan kabupaten.”

Berdasarkan wawancara yang diberikan, pelaksanaan tugas pemerintah kampung dapat dianalisis dari indikator ketepatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur. Ketepatan dalam Pembagian Tugas dan Fungsi Deskripsi Kepala kampung memastikan setiap aparat menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jika terdapat kendala, dilakukan diskusi dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah.

Tugas setiap aparat diselesaikan tepat waktu tanpa tumpang tindih. Sistem pengawasan oleh kepala kampung dan sekretaris berjalan dengan baik. Ketepatan pembagian tugas yang sesuai tupoksi masing-masing aparat menunjukkan bahwa pemerintah kampung memiliki mekanisme kerja yang terorganisasi dan mengikuti prosedur. Mekanisme Sosialisasi Prosedur Pemerintah kampung menggunakan RT sebagai penghubung antara pemerintah kampung dan masyarakat.

Setiap kebijakan atau keputusan dibahas dalam musyawarah di balai kampung

sehingga menjadi kesepakatan bersama. Jika diperlukan, pihak distrik dilibatkan untuk memberikan bimbingan kepada perangkat kampung. Proses sosialisasi berjalan secara terstruktur melalui RT hingga masyarakat Musyawarah menghasilkan keputusan yang diterima oleh semua pihak. Mekanisme ini menunjukkan ketepatan dalam prosedur komunikasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan, yang juga meminimalkan kesalahpahaman antara pemerintah kampung dan masyarakat.

Ketepatan Waktu dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah kampung memiliki jadwal kegiatan yang disusun sebelumnya, dan semua kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal tersebut. Instruksi dari kepala kampung dipatuhi oleh seluruh perangkat kampung untuk memastikan keberhasilan program kerja. Jadwal kegiatan dipatuhi dan dilaksanakan sesuai rencana tanpa penundaan. Tugas dan kegiatan kampung selesai tepat waktu. Kepatuhan terhadap jadwal menunjukkan bahwa pemerintah kampung telah menjalankan tugasnya dengan disiplin dan tepat waktu, sesuai prosedur yang ditetapkan. Kaur Keuangan memastikan pengelolaan dana sesuai dengan tahapan prosedural. Segera menindaklanjuti informasi terkait dana desa atau dana lainnya tanpa menunda.

Efisiensi Dalam Menyelesaikan Tugas

Efisiensi tugas pokok dan fungsi pemerintah Kampung Sekban dapat dianalisis dari indikator ketepatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan ini dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara dengan beberapa informan. Informan pertama yaitu yang di sampaikan oleh Ibu Rahma Tanggama sebagai berikut:

“Untuk efisiensi kami ada metode internet, manual, secara pemerintahan kampung.”

Dan pernyataan dari Bapak La Aidin La Adi sebagai berikut:

“dalam hal efisiensi, jika tergetnya belum terlaksana di bulan ini maka enam bulan kedepan tidak boleh lewat dari bulan ini itu suda melampaui batas kemampuan. Penyelesaian kegiatan secara trasparan terhadap masyarakat. Kalau ada hal-hal yang tidak di mengerti dapat di tanyakan lagsung.”

Soal efisiensi juga disampaikan oleh Ibu Megawati salah satu aparat kampung, sebagai berikut:

“Saya sendiri menggunakan SISKAUDES dan PRODESKEL tapi dua aplikasi tersebut jujur saja kami belum lagsung terlalu mendalami, kalau untuk saya selalu memakai SISKAUDES untuk keuangan desa supayablagsung di perhatikan oleh pusat jadi apa yang kita lakukan di kampung lagsung masuk ke pusat.”

Berdasarkan wawancara dengan Pemerintah Kampung tentang efisiensi dalam menjalankan tugas yang dianalisis dari indikator ketepatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur diperoleh informasi bahwa Kepala kampung memastikan setiap aparat menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jika terdapat kendala, dilakukan diskusi dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Tugas setiap aparat diselesaikan tepat waktu tanpa tumpang tindih. Sistem pengawasan oleh kepala kampung dan sekretaris berjalan dengan baik.

Ketepatan pembagian tugas yang sesuai tupoksi masing-masing aparat menunjukkan bahwa pemerintah kampung memiliki mekanisme kerja yang terorganisasi dan mengikuti prosedur. Pemerintah kampung menggunakan RT sebagai penghubung antara pemerintah kampung dan masyarakat. Setiap kebijakan atau keputusan dibahas dalam musyawarah di balai kampung sehingga menjadi kesepakatan bersama. Jika diperlukan, pihak distrik dilibatkan untuk memberikan bimbingan kepada perangkat kampung. Proses sosialisasi

berjalan secara terstruktur melalui RT hingga masyarakat. Musyawarah menghasilkan keputusan yang diterima oleh semua.

Ketepatan Waktu dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah kampung memiliki jadwal kegiatan yang disusun sebelumnya, dan semua kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal ter Instruksi dari kepala kampung dipatuhi oleh seluruh perangkat kampung untuk memastikan keberhasilan program kerja. Jadwal kegiatan dipatuhi dan dilaksanakan sesuai rencana tanpa penundaan. Tugas dan kegiatan kampung selesai tepat waktu.

Pemahaman Pemerintah Kampung Tentang Keberhasilan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat dilihat ketersediaan pelayanan yang Terjangkau dan Responsif. Hasil wawancara dengan beberapa informan tentang ketersediaan pelayanan yang pertama dari Kepala Kampung, Ibu Rahma Tanggama. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Peningkatan Pelayanan publik yang dilakukan contohnya sudah menggunakan internet. Apabila ada mereka punya pertanyaan, kami bagaiman caranya menjelaskan sesuai dengan kemampuan pengertian mereka. Kadang mereka menayakan ke kami secara lamsung dan Pemerintah Kampung akan menyampaikan hal itu sesuai dengan pengertian dan pengalaman mereka untuk mereka pahami. Kalau disini kan kebanyakan minta surat-surat domisili dan surat-surat lainnya dan alhamdulillah kami punya kaur pemerintah yang alhamdullah yang aktif apapun sesibuk apapun kita kami selalu berupaya melayani masyarakat dengan sepenuh hati”.

Pendapat lain juga datang dari ibu Megawati salah satu Aparat Kampung yang mengatakan bahwa:

“Kita biasanya selalu terbuka dua puluh empat jam, walaupun jam kerja tidak sampai situ tapi ada saja yang buat izin usaha, domesili, selalu terbuka tidak pernah tertutup kalau memang di kantor tidak terbuka selalu datang ke rumah-rumah, misalkan contoh kaya saya atau bapak Fredy kita selalu membuka pelayanan untuk balita, lansia, semua anak yatim piyatu jadi disini selalu ada pelayanan.”

Hal senada juga di samapaikan oleh bapak Fredy J.O Masnifit salah satu Aparat Kampung yang mengatakan bahwa:

“Kantor Sekban dibuka samapai jam dua belas malam secara online, itu berarti tingkat pelayanan dibuka untuk mencapai pelayananan yang baik, masalah hari ini selesai juga di hari itu juga, jadi kita sistem digital surat bisa fia *online*. Kita kirim bentuk pdf, atau scan (QR) kita kirim ke teman- teman atau keluarga yang membutuhkan surat. Kantor Kampung dibuka selalu, disinilah pusat pelayanan publik pusat informasi sehingga seluruh stekholder dari masyarakat ataupun pihak lain yang membutuhkan informasi terkait perkembangan pembangunan Kampung selalu tersedia *on time* atau tepat waku.”

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan keberhasilan tentang keberhasilan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik menunjukkan bahwa Kantor kampung beroperasi lebih lama dari jam kerja standar, bahkan hingga malam hari, untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kapan saja. Jika kantor kampung tidak dapat melayani secara langsung, pelayanan juga dilakukan secara proaktif di rumah warga. Kantor kampung terbuka hingga jam 12 malam, menunjukkan fleksibilitas dalam melayani masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan, seperti pembuatan surat domisili, izin usaha, dan bantuan sosial.

Pemerintah kampung memanfaatkan teknologi seperti aplikasi SISKAUDES dan

Prodeskel untuk mengelola data keuangan dan pemerintahan secara terintegrasi. Pelayanan surat- menyurat dapat dilakukan secara digital, misalnya melalui pengiriman dokumen dalam format PDF atau QR code. Masyarakat dapat menerima dokumen atau informasi secara cepat melalui media digital. Teknologi digunakan untuk mempercepat penyelesaian layanan dalam waktu singkat (sehari selesai).

Integrasi teknologi dalam pelayanan menunjukkan adanya inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan, meskipun pemahaman tentang aplikasi seperti SISKAUDES dan Prodeskel masih perlu ditingkatkan. Pemerintah kampung tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor, tetapi juga mendatangi rumah warga untuk memberikan layanan.

Pelayanan tidak terbatas pada administrasi, tetapi mencakup pelayanan sosial untuk balita, lansia, dan anak yatim piatu. Kelompok rentan mendapatkan perhatian khusus, seperti pelayanan kesehatan atau bantuan sosial. Pendekatan proaktif memastikan semua warga, termasuk yang tidak bisa datang ke kantor, tetap terlayani. Pelayanan yang proaktif dan inklusif mencerminkan komitmen pemerintah kampung terhadap prinsip keadilan sosial dalam memberikan pelayanan yang merata bagi seluruh masyarakat. Pemerintah kampung menggunakan pendekatan terbuka dan interaktif untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Tersedianya informasi publik secara on-time dan akurat melalui pusat pelayanan di kantor kampung. Transparansi dan akuntabilitas yang terjaga dengan baik menunjukkan bahwa pemerintah kampung memahami pentingnya komunikasi yang terbuka untuk membangun kepercayaan masyarakat. Masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan karena pemerintah kampung melayani dengan sepenuh hati, meskipun terdapat keterbatasan. Layanan seperti surat domisili dan izin usaha dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kampung dalam menyelesaikan kebutuhan administratif dan sosial mereka. Kepuasan masyarakat mencerminkan efektivitas pemerintah kampung dalam memahami kebutuhan warga dan memberikan solusi yang relevan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Keberhasilan Dalam Menjalankan Tugas Sesuai Bidang Tugasnya Peningkatan kesejahteraan warga melalui program-program prioritas Tata kelola administrasi yang tertata dengan baik dan diakui secara eksternal. Penanganan kendala melalui komunikasi efektif dan musyawarah bersama. Transformasi kampung menuju digitalisasi dengan data yang akurat dan valid. Keberhasilan dalam mengintegrasikan peran semua elemen pemerintahan dan masyarakat dalam pembangunan kampung. Secara keseluruhan, keberhasilan pemerintah kampung tercermin dari kepuasan masyarakat terhadap program-program yang dijalankan, pengakuan eksternal atas tata kelola administrasi, dan langkah- langkah strategis menuju pembangunan kampung yang lebih modern dan terintegrasi.
2. Indikator Ketepatan dalam Melaksanakan Tugas Sesuai Prosedur Pembagian Tugas, Tugas dijalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat kampung, dengan mekanisme kontrol dari kepala kampung dan sekretaris. Sosialisasi dan Komunikasi. Prosedur dan kebijakan disosialisasikan melalui mekanisme RT dan musyawarah di balai kampung. Ketepatan Waktu. Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal tanpa penundaan. Pengelolaan Keuangan. Pengelolaan dana desa dilakukan secara prosedural dan dilaporkan tepat waktu. Transparansi. Pemerintah kampung mempublikasikan informasi secara terbuka, menunjukkan akuntabilitas. Secara keseluruhan, ketepatan dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur dapat dikatakan. Pemerintah kampung menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap prosedur

- administratif dan operasional, disertai dengan mekanisme kontrol yang efektif.
3. Indikator Ketepatan Dalam Melaksanakan Tugas Sesuai Prosedur Pembagian Tugas dijalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat kampung, dengan mekanisme kontrol dari kepala kampung dan sekretaris. Prosedur dan kebijakan disosialisasikan melalui mekanisme RT dan musyawarah di balai kampung. Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal tanpa penundaan. Pengelolaan dana desa dilakukan secara prosedural dan dilaporkan tepat waktu. Pemerintah kampung mempublikasikan informasi secara terbuka, menunjukkan akuntabilitas.
 4. Indikator keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik terlihat dari ketersediaan pelayanan yang terjangkau dan responsif. Kantor kampung beroperasi lebih lama dari jam kerja standar, bahkan hingga malam hari, untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kapan saja. Jika kantor kampung tidak dapat melayani secara langsung, pelayanan juga dilakukan secara proaktif di rumah warga. Kantor kampung terbuka hingga jam 12 malam, menunjukkan fleksibilitas dalam melayani masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan, seperti pembuatan surat domisili, izin usaha, dan bantuan sosial. Pelayanan tidak terbatas pada administrasi, tetapi mencakup pelayanan sosial untuk balita, lansia, dan anak yatim piatu. Kelompok rentan mendapatkan perhatian khusus, seperti pelayanan kesehatan atau bantuan sosial. Pendekatan proaktif memastikan semua warga, termasuk yang tidak bisa datang ke kantor, tetap terlayani. Pelayanan yang proaktif dan inklusif mencerminkan komitmen pemerintah kampung terhadap prinsip keadilan sosial dalam memberikan pelayanan yang merata bagi seluruh masyarakat. Pemerintah kampung menggunakan pendekatan terbuka dan interaktif untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencana Keuangan. (2019). Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak No 15 Tahun 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/194659/perbup-kab-fak-fak-no-15-tahun-2019>. Di akses bulan Agustus Tahun 2024.
- Densin, K.N; dan Lincoln, S.Y. 2009. *Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan:Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irawan, Agus. (2018). Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, Volume 1 No 2. 54-67.
- Indonesia. (2021). *UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, bahwa pada pasal 1 ayat 14*.
- Indonesia, (2024). *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 1*.
- Janice, Astrela (2014). Studi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi badan pemberdayaan masyarakat desa (BPMD) dalam pembangunan desa di desa tanjung lapang kecamatan malinau barat kabupaten malinau. *E.Journal Ilmu pemerintahan.*, volume 3 nomor 3 tahun 2015. EISSN 1460-1471.
- Mohan, Anwar. (2024). Kepala Kampung Sekban Ajak Warga Jaga Kebersihan Lingkungan. <https://rri.co.id/lain-lain/941270/kepala-kampung-sekban-ajak-warga-jaga-kebersihan-lingkungan#>. Di akses tanggal 20 September 2024.

- Moleong, Lexy, J (2019) *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy, J (2010) *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy, J (2020) *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy, J (2005) *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Purba, Sri Ulina BR. "Tugas dan fungsi kepala desa beserta perangkat desa dalam meningkatkan kinerja pada kantor desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang." (2015).
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yolanda, yayank. (2019). Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. *Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*.